BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi merupakan salah satu pilar penting dalam sistem perekonomian nasional Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan koperasi dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 mendefinisikan koperasi sebagai badan hukum yang dibentuk oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan memisahkan sebagian kekayaan anggotanya sebagai modal menjalankan usaha untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi (Mulyana et al., 2026).

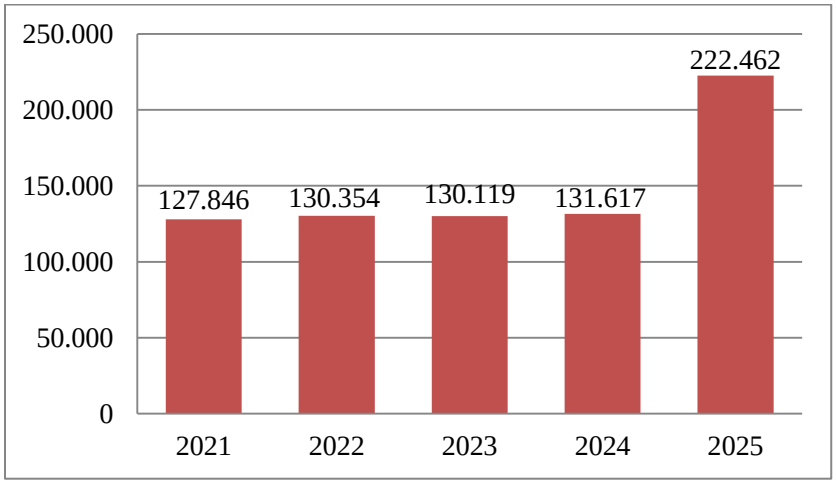
Koperasi merupakan badan usaha berbadan hukum yang menghimpun anggota dengan tujuan menciptakan nilai tambah yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (Pasaribu & Kusmilawaty, 2024). Selain berorientasi pada bidang ekonomi, koperasi berperan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang mendorong partisipasi masyarakat dalam memperkuat struktur perekonomian nasional melalui penerapan prinsip demokrasi ekonomi yang berasaskan kekeluargaan (Alfitrah & Perkasa, 2023). Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dikenal lima jenis koperasi antara lain koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi simpan pinjam, koperasi pemasaran dan koperasi jasa.

Sebagai lembaga ekonomi yang memiliki karakter sosial, koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara luas. Koperasi juga memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya dalam upaya pemerataan

pembangunan dan peningkatan hasil-hasil pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Zulfikar et al., 2025). Oleh karena itu, koperasi dituntut untuk mampu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh anggota maupun masyarakat dalam pengelolaan dana yang dihimpun.

Komitmen koperasi dalam mengelola dana anggota dan masyarakat tercermin melalui upaya menjaga kesehatan dan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Kinerja koperasi menjadi aspek yang sangat penting karena menggambarkan kemampuan koperasi dalam menjalankan fungsi ekonomi dan sosialnya secara efektif. Koperasi dengan kinerja yang sehat akan mampu menjalankan kegiatan operasionalnya secara mandiri, memenuhi kewajiban keuangannya, dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi anggotanya (Annisa et al., 2024).

Berdasarkan fungsi dan kegunaannya koperasi di Indonesia dibagi menjadi dua kelompok yaitu satu fungsi (*single purpose*) dan banyak fungsi (*multi purpose*). Koperasi dengan fungsi *single purpose* secara umum terdiri dari 6 kelompok diantaranya koperasi produksi, koperasi pembelian, koperasi konsumsi, koperasi penjualan, koperasi kredit, dan koperasi jasa. Koperasi dengan fungsinya *multi purpose* adalah koperasi yang menjalankan lebih dari satu unit usaha, contohnya adalah koperasi unit desa (Hyronimus & Langga, 2022). Berikut merupakan data jumlah koperasi di Indonesia selama 2021-2025:



Gambar 1. 1
Jumlah Koperasi Aktif di Indonesia Tahun 2021 - 2025
Sumber : BPS Tahun 2025

Berdasarkan Gambar 1.1 mengenai data jumlah koperasi aktif di Indonesia tahun 2021–2025 menunjukkan kestabilan dengan adanya sedikit penurunan. Terjadi peningkatan dari 127.846 unit pada tahun 2021 menjadi 130.354 unit pada tahun 2022, kemudian sedikit menurun pada tahun 2023 menjadi 130.119 unit, dan kembali meningkat pada tahun 2024 sebesar 131.617 unit. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2025 menjadi 222.462 unit, yang menunjukkan adanya perkembangan pesat dalam sektor koperasi. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa koperasi di Indonesia terus berkembang dan memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, berikut jumlah koperasi aktif di Kabupaten Kuningan dari tahun 2023 - 2025 :

Tabel 1. 1
Data Perkembangan Koperasi di Kabupaten Kuningan
Periode 2023 - 2025

Tahun	Jumlah Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi Tidak Aktif	Jumlah Anggota
2023	778	503	258	34.570
2024	799	535	254	40.512
2025	1.206	946	260	42.276

Sumber : Laporan Dinas Koperasi Kabupaten Kuningan

Pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah koperasi dan anggota. Jumlah koperasi meningkat dari 778 unit pada tahun 2023 menjadi 799 unit pada tahun 2024 sampai dengan 1.206 unit pada tahun 2025. Jumlah koperasi aktif juga mengalami peningkatan dari 503 unit pada tahun 2023 menjadi 535 unit di tahun 2024, hingga 946 unit di tahun 2025. Selain itu, jumlah anggota koperasi turut mengalami kenaikan dari 34.570 anggota pada tahun 2023 menjadi 40.512 anggota pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 42.276 anggota pada tahun 2025.

Meskipun demikian, jumlah koperasi tidak aktif masih tergolong cukup tinggi. Pada tahun 2023 terdapat 258 koperasi tidak aktif, kemudian sedikit menurun menjadi 254 unit pada tahun 2024, namun kembali meningkat menjadi 260 unit pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah koperasi yang belum mampu menjalankan kegiatan operasional secara optimal. Tingginya jumlah koperasi tidak aktif ini disebabkan adanya permasalahan dalam pengelolaan dan keberlanjutan keuangan koperasi, sehingga *financial sustainability* menjadi hal penting yang perlu diperhatikan agar koperasi dapat bertahan dan berkembang secara berkelanjutan.

Salah satu bentuk koperasi yang cukup diminati oleh masyarakat adalah koperasi simpan pinjam. Saat ini, usaha yang bergerak di bidang koperasi simpan pinjam mengalami perkembangan yang cukup pesat di Indonesia. Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu bentuk usaha di bidang ekonomi yang bersifat stabil serta dalam operasionalnya juga memiliki peran sosial (Ulya, 2022). Kegiatan usahanya dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku dalam pengelolaan usaha. Pembentukan koperasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus memberikan manfaat serta kemudahan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Berikut disajikan data koperasi simpan pinjam di Kabupaten Kuningan pada tahun 2023 – 2025:

Tabel 1. 2
Data Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Kuningan
Tahun 2023 - 2025

No	Tahun	Jumlah	Aktif	Tidak Aktif
1	2023	54	37	17
2	2024	71	48	23
3	2025	71	49	22

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kuningan

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, data koperasi simpan pinjam di Kabupaten Kuningan pada tahun 2023 hingga 2025, pada tahun 2023 jumlah koperasi tercatat sebanyak 54 unit, kemudian meningkat menjadi 71 unit pada tahun 2024 dan jumlah tersebut tetap pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya pertambahan koperasi yang terdaftar di Kabupaten Kuningan dalam periode tersebut.

Jumlah koperasi aktif juga mengalami peningkatan dari 37 unit pada tahun 2023 menjadi 48 unit pada tahun 2024, kemudian kembali meningkat menjadi 49 unit pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar koperasi masih mampu menjalankan kegiatan usahanya secara operasional. Meskipun demikian, jumlah koperasi yang tidak aktif masih tergolong cukup tinggi, yaitu 17 unit pada tahun 2023, meningkat menjadi 23 unit pada tahun 2024, lalu sedikit menurun menjadi 22 unit pada tahun 2025.

Hal ini menunjukkan bahwa masih ada koperasi yang mengalami kesulitan dalam menjaga kelangsungan usaha dan stabilitas keuangan mereka. Tidak naiknya jumlah koperasi yang aktif tidak berarti ada masalah dalam pengelolaan keuangan, kualitas laporan keuangan yang rendah, pengendalian internal yang lemah, atau keterbatasan kemampuan para pengurus koperasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa masalah keuangan yang berkelanjutan masih menjadi tantangan utama bagi koperasi simpan pinjam di Kabupaten Kuningan, dan perlu diteliti lebih lanjut agar koperasi dapat bertahan dan berkembang secara berkelanjutan.

Fenomena ini diperkuat oleh berbagai pemberitaan di Kabupaten Kuningan. Berdasarkan laporan media lokal yaitu Kabar Cirebon yang ditulis oleh Dandie tahun 2021, banyaknya anggota mengeluh karena uang tabungannya tidak bisa dicairkan meskipun sangat dibutuhkan, terutama selama masa pandemi Covid-19. Anggota sebelumnya tertarik karena menawarkan bunga tabungan yang besar, tetapi ternyata koperasi tidak memenuhi kewajibannya kepada anggota. Selain itu, kasus serupa terjadi di KSP Mekar Jaya, Kecamatan Maleber, seperti yang dilaporkan oleh EdukadiNews (2025). Sebanyak 340 anggota mengeluhkan ketidakjelasan mengenai dana simpanan yang mencapai sekitar Rp22 miliar, karena pengurus belum bisa memberikan informasi jelas mengenai pencairan dana tersebut. Permasalahan semakin kompleks karena hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2024 belum direalisasikan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan koperasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya transparansi laporan keuangan, lemahnya pengendalian internal, menurunnya kepercayaan anggota, dan terancamnya keberlanjutan keuangan koperasi simpan pinjam itu sendiri.

Peneliti juga melakukan pra-survey terhadap 30 responden yang terdiri dari pengurus dan anggota koperasi simpan pinjam di Kabupaten Kuningan pada bulan April 2026. Berikut disajikan tabel hasil pra-survey yang dilakukan oleh peneliti:

Tabel 1. 3
Hasil Pra Survey

No	Pernyataan	Jumlah Responden	Jawaban		Persentase	
			Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Koperasi mengalami kesulitan dalam menjaga stabilitas keuangan	30	19	11	63,33%	36,67%
2	Laporan keuangan belum disusun sesuai standar yang berlaku	30	17	13	56,67%	43,33%

No	Pernyataan	Jumlah Responden	Jawaban		Persentase	
			Ya	Tidak	Ya	Tidak
3	Tingkat kredit macet pada koperasi masih cukup tinggi	30	18	12	60%	40%
4	Sistem pengendalian internal belum berjalan secara efektif	30	16	14	53,33%	46,67%
5	Kompetensi pengelola koperasi dalam bidang keuangan masih terbatas	30	14	16	46,67%	53,33%

Sumber : Data Pra-Survey Penelitian, 2026

Berdasarkan Tabel 1.3 hasil pra-survey yang dilakukan terhadap 30 responden yang terdiri dari pengurus dan anggota koperasi simpan pinjam di Kabupaten Kuningan pada bulan April 2026, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa masih adanya berbagai permasalahan dalam menjaga keberlanjutan keuangan koperasi. Sebanyak 63,33% responden menyatakan bahwa koperasi mengalami kesulitan dalam menjaga stabilitas keuangan. Selain itu, 56,67% responden menyatakan bahwa laporan keuangan belum disusun sesuai dengan standar yang berlaku, sedangkan 60% responden mengungkapkan bahwa tingkat kredit macet masih cukup tinggi. Terlihat pada sistem pengendalian internal, sebanyak 53,33% responden menyatakan bahwa sistem pengendalian internal belum berjalan secara efektif. Adapun 46,67% responden menyatakan bahwa kompetensi pengelola dalam bidang keuangan masih terbatas. Hasil pra-survey ini menunjukkan bahwa keberlanjutan keuangan koperasi simpan pinjam di Kabupaten Kuningan masih menghadapi berbagai hambatan.

Hasil wawancara dengan Pak Herlan, pengurus BMT An-Nahdah yang dilaksanakan pada Senin, 12 Januari 2026 menunjukkan bahwa tantangan utama dalam menjaga keberlanjutan keuangan adalah tingginya tingkat kredit macet serta rendahnya partisipasi anggota dalam simpanan

rutin. Ketidakseimbangan antara dana yang dihimpun dan penyaluran pinjaman menyebabkan terganggunya arus kas koperasi. Selain itu, masih terdapat anggota yang kurang disiplin dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman tepat waktu. Hal ini meningkatkan risiko keuangan yang harus ditanggung koperasi dan dapat menghambat pertumbuhan usaha. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi menurunkan tingkat kesehatan dan kinerja koperasi. Koperasi juga menghadapi kendala dalam pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal. Proses pencatatan yang masih dilakukan secara manual berisiko menimbulkan kesalahan serta memperlambat penyusunan laporan keuangan. Selain itu, belum optimalnya sistem pengawasan internal membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dana.

Kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan dalam keberlangsungan operasional koperasi, khususnya dalam menjaga kinerja dan stabilitas keuangan. Penurunan jumlah koperasi aktif dapat menjadi salah satu indikator bahwa tidak semua koperasi mampu bertahan dalam menghadapi tantangan ekonomi dan pengelolaan usaha. Fenomena ini menunjukkan pentingnya keberlanjutan keuangan sebagai faktor utama dalam menjaga eksistensi koperasi. Keberlanjutan keuangan menjadi aspek yang penting untuk menentukan pertahanan koperasi dan perkembangan koperasi dalam menjalankan fungsinya secara optimal (Kinaro et al., 2025).

Permasalahan keberlanjutan keuangan koperasi tidak hanya berdampak pada internal organisasi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Koperasi yang tidak mampu mempertahankan keberlanjutan keuangannya berpotensi mengalami kebangkrutan, sehingga mengakibatkan hilangnya akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil (Pratama et al., 2025). Selain itu, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi dapat mendorong peralihan ke lembaga keuangan informal yang memiliki risiko lebih tinggi. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi

daerah dan menurunkan kontribusi koperasi terhadap pembangunan ekonomi lokal.

Keberlanjutan keuangan (*financial sustainability*) merupakan hal yang penting bagi koperasi dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terus berubah (Noviyanti & Herlissha, 2025). Di tengah ketidakpastian ekonomi global, penerapan strategi keuangan yang berorientasi pada keberlanjutan berperan penting dalam menjaga stabilitas internal organisasi sekaligus meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap dinamika lingkungan dan pasar (Anjarwati et al., 2024). Keberlanjutan keuangan tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi menunjukkan perubahan cara pandang dan strategi operasional jangka panjang perusahaan. Keberlanjutan keuangan menunjukkan kemampuan koperasi untuk menjalankan kegiatan operasionalnya secara berkesinambungan, memenuhi kewajiban keuangan, serta mengembangkan usaha tanpa adanya ketergantungan yang berlebihan terhadap bantuan pihak eksternal.

Keberlanjutan keuangan digunakan sebagai indikator untuk memprediksi potensi *going concern* koperasi di masa yang akan datang dimana koperasi perlu memiliki tingkat *sustainability* dan pertumbuhan yang baik untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Koperasi yang tidak memiliki keberlanjutan keuangan yang baik, akan berisiko mengalami penurunan kinerja, kehilangan kepercayaan anggota, bahkan akan berujung pada pembubaran (Khozairi et al., 2025). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyusun dan menerbitkan *roadmap* keuangan berkelanjutan sebagai pedoman bagi lembaga jasa keuangan dalam mendukung penerapan prinsip keuangan berkelanjutan (Widiyati, 2024). Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan serta meningkatkan daya saing Lembaga Jasa Keuangan (LJK), sehingga mampu menjaga kinerja keuangan secara berkesinambungan dan terus berkembang dalam jangka panjang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan keuangan koperasi menurut Rustendi et al. (2026) meliputi kualitas laporan keuangan dan pengendalian internal yang terbukti berpengaruh positif terhadap keberlangsungan usaha. Selain itu, Arpaini & Ovami (2024) juga menemukan bahwa pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang pada akhirnya berdampak pada keberlanjutan keuangan koperasi. Di sisi lain, mengungkapkan bahwa risiko perilaku keuangan juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi stabilitas dan keberlanjutan keuangan organisasi, terutama dalam pengambilan keputusan keuangan yang kurang rasional. Hasil-hasil Jufriadi et al. (2022) penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan keuangan koperasi sangat dipengaruhi oleh kualitas pelaporan keuangan, efektivitas sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, serta perilaku keuangan pengelola dalam mengelola dana koperasi.

Salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi keberlanjutan keuangan koperasi adalah kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan alat utama pertanggungjawaban pengelolaan keuangan koperasi kepada anggota dan pemangku kepentingan (Pebriani et al., 2024). Laporan keuangan yang berkualitas, relevan, andal, dapat dipahami, dan tepat waktu akan mendukung pengambilan keputusan yang tepat serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Purba et al., 2025). Transparansi laporan keuangan juga berperan penting dalam membangun kepercayaan anggota terhadap kinerja pengurus koperasi, yang pada akhirnya berdampak pada partisipasi anggota dalam jangka panjang.

Namun, pada kenyataannya, masih banyak koperasi yang menyusun laporan keuangan secara sederhana dan belum sepenuhnya mengikuti Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) atau standar koperasi yang berlaku. Hal ini menyebabkan informasi keuangan yang dihasilkan kurang menunjukkan kondisi keuangan koperasi secara

sesungguhnya, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan (Untan, 2023).

Selain kualitas laporan keuangan, efektivitas pengendalian internal juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas keuangan koperasi. Sistem pengendalian internal yang efektif berfungsi untuk melindungi aset, mencegah kecurangan, serta menjamin keandalan laporan keuangan (Harared & Heriyanto, 2022). Aset perusahaan sangat rentan terhadap penyalahgunaan atau penggelapan sehingga memerlukan sistem pengendalian internal yang memadai dalam pengelolaan kas agar risiko dapat diminimalkan. Keefektifan pengendalian internal berperan dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga meminimalkan kecenderungan dalam hal kecurangan akuntansi (Tyas, 2022). Dalam pengendalian internal terdiri kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan-tujuan organisasi akan tercapai dengan layak.

Faktor lain yang mempengaruhi keberlanjutan keuangan koperasi adalah risiko perilaku keuangan pengelola koperasi. Risiko perilaku keuangan berkaitan dengan kecenderungan individu dalam mengambil keputusan keuangan yang tidak rasional, seperti kurangnya perencanaan keuangan, pengambilan risiko berlebihan, serta rendahnya disiplin dalam pengelolaan dana (Muslim et al., 2025). Pengelolaan keuangan yang tidak terencana dengan baik dapat menyebabkan ketidakseimbangan arus kas, penggunaan dana yang tidak efisien, dan meningkatnya potensi kerugian operasional yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya keberlanjutan keuangan koperasi (Agma, 2025). Kualitas pengelolaan berpengaruh terhadap stabilitas dan kinerja keuangan koperasi dalam jangka panjang.

Selain itu, kompetensi pengelola koperasi juga merupakan faktor kunci dalam mencapai keberlanjutan keuangan. Kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam bidang keuangan, akuntansi, dan manajemen koperasi. Kompetensi sumber daya manusia

berpengaruh terhadap keberlanjutan koperasi, karena kinerja usaha yang baik ditentukan oleh bagaimana setiap individu mengelolanya (Maulatuzulfa & Rokhmania, 2022). Pengelola koperasi yang memiliki kompetensi memadai akan mampu menyusun perencanaan keuangan yang efektif, mengelola arus kas secara efisien, serta memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan kompetensi yang baik, pengelola koperasi akan lebih mampu mengidentifikasi risiko keuangan dan merumuskan langkah pencegahan yang tepat untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan usaha koperasi (Widodo et al., 2024). Keterbatasan kompetensi pengelola, dapat menyebabkan lemahnya perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja keuangan koperasi, yang akhirnya berpotensi menurunkan kepercayaan anggota dan menghambat pertumbuhan koperasi.

Beberapa penelitian terbaru meneliti aspek yang berkaitan dengan keberlanjutan koperasi dan kinerja pengelolaan keuangan, meskipun fokusnya belum secara komprehensif menjadi fokus penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Noviana, Yohana, dan Haeri pada tahun (2023) menemukan bahwa pengelolaan keuangan yang baik, dukungan institusional, dan partisipasi anggota merupakan faktor penentu keberlanjutan usaha koperasi, meskipun didalamnya masih terdapat kebutuhan untuk memperbaiki akuntabilitas dan pencatatan keuangan yang lebih baik.

Penelitian lain yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Dekrita et al. pada tahun (2024) mengenai persepsi manajer terhadap implementasi akuntansi berkelanjutan masih beragam dan penerapannya menghadapi tantangan sumber daya dan regulasi, sehingga menunjukkan adanya keterbatasan integrasi keberlanjutan dalam pelaporan dan kegiatan keuangan koperasi. Secara umum, penelitian yang dilakukan oleh Jaafar et al. pada tahun (2025) mengungkapkan bahwa hubungan antara perencanaan strategis, sistem pengendalian internal, kemampuan organisasi, dan kinerja keberlanjutan koperasi. Penelitian ini menekankan

pada pentingnya kemampuan internal dan peran pengendalian dalam mendukung keberlanjutan koperasi, meskipun terjadi di negara lain.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa keberlanjutan keuangan koperasi tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi eksternal, tetapi juga sangat ditentukan oleh faktor-faktor internal seperti kualitas laporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, risiko perilaku keuangan, dan kompetensi sumber daya manusia. Masih adanya penurunan jumlah koperasi simpan pinjam yang aktif di Kabupaten Kuningan menunjukkan adanya permasalahan dalam pengelolaan dan stabilitas keuangan koperasi yang perlu dikaji.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan keuangan koperasi sehingga dapat menjadi dasar dalam upaya perbaikan pengelolaan serta penguatan kinerja koperasi di Kabupaten Kuningan. Dengan demikian, penelitian ini mengambil judul "**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberlanjutan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Kuningan**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian mengenai keberlanjutan keuangan koperasi di Kabupaten Kuningan, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap keberlanjutan keuangan koperasi simpan pinjam di Kabupaten Kuningan?
2. Bagaimana pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap keberlanjutan keuangan koperasi simpan pinjam di Kabupaten Kuningan?
3. Bagaimana pengaruh risiko perilaku keuangan berpengaruh terhadap keberlanjutan keuangan koperasi simpan pinjam di Kabupaten Kuningan?

4. Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap keberlanjutan keuangan koperasi simpan pinjam di Kabupaten Kuningan?

1.3 Tujuan Penelitan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian untuk membuktikan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap keberlanjutan keuangan koperasi simpan pinjam di Kabupaten Kuningan.
2. Pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap keberlanjutan keuangan koperasi simpan pinjam di Kabupaten Kuningan.
3. Pengaruh risiko perilaku keuangan terhadap keberlanjutan keuangan koperasi simpan pinjam di Kabupaten Kuningan.
4. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap keberlanjutan keuangan koperasi simpan pinjam di Kabupaten Kuningan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana informasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan keuangan koperasi simpan pinjam, khususnya yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, risiko perilaku keuangan, dan kompetensi sumber daya manusia. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian teori di bidang akuntansi keuangan, manajemen keuangan, dan tata kelola koperasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan data empirik terbaru yang dapat memperkaya teori-teori yang berkaitan dengan

keberlanjutan keuangan koperasi, kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, perilaku keuangan, dan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan koperasi.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pengelola koperasi simpan pinjam di Kabupaten Kuningan dalam meningkatkan keberlanjutan keuangan koperasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran, rekomendasi, serta informasi yang bermanfaat bagi pihak manajemen koperasi, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan koperasi simpan pinjam secara berkelanjutan.